

**PERAN BPBD DALAM PENINGKATAN KESADARAN
BENCANA PADA KALANGAN RELAWAN BENCANA
DI KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI



oleh :

SUPARTO
NIM. 212365201002

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DARUL ULUM
2025

PERAN BPBD DALAM PENINGKATAN KESADARAN BENCANA PADA KALANGAN RELAWAN BENCANA DI KABUPATEN JOMBANG

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul ‘Ulum**

Jombang

oleh :

SUPARTO

NIM. 212365201002

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DARUL ULUM
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN BPBD DALAM PENINGKATAN KESADARAN BENCANA PADA KALANGAN RELAWAN BENCANA DI KABUPATEN JOMBANG

oleh :

SUPARTO

NIM. 212365201002

Menyetujui :

Tanggal 22 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Dr. H. Machwal Huda, M.Si
NIDN. 0711066201

Pembimbing Pendamping,



Farichatun Nisa', S.IAN., M.KP.
NIDN. 0729099103

Mengetahui :

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan,



Farichatun Nisa', S.IAN., M.KP.
NIDN. 0729099103

HALAMAN PENGESAHAN

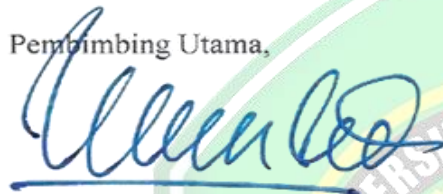
**PERAN BPBD DALAM PENINGKATAN KESADARAN
BENCANA PADA KALANGAN RELAWAN BENCANA
DI KABUPATEN JOMBANG**

oleh :

SUPARTO
NIM. 212365201002

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Dewan Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul Ulum.

Pembimbing Utama,



Dr. H. Machwal Huda, M.Si
NIDN. 0711066201

Anggota Dewan Penguji,



Drs. H. Hudallah, M.Si
NIDN. 0718036205

Pembimbing Pendamping,

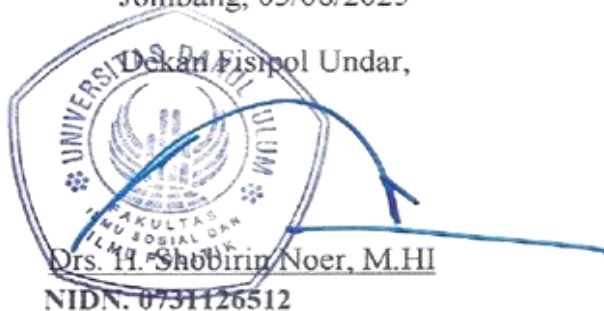


Farichatun Nisa', S.IAN., M.KP
NIDN. 0729099103

Skripsi ini telah diterima dan disahkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)

Jombang, 03/08/2025

Dekan Fisipol Undar,



Drs. H. Shobirin Noer, M.HI
NIDN. 0731126512

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SUPARTO**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 10 Juni 1986
Nim : 212365201002
Program studi : Ilmu Pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Darul Ulum
Judul : PERAN BPBD DALAM PENINGKATAN KESADARAN BENCANA PADA KALANGAN RELAWAN BENCANA DI KABUPATEN JOMBANG
Alamat : Dsn. Cangak, RT/RW 002/001, Ds. Sumbernongko, Kec. Ngusikan

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul diatas tersebut tidak terdapat karya ilmiah yang pernah ditulis atau diteliti oleh orang lain dan tidak pernah diterbitkan orang lain.

Apabila ternyata terdapat unsur-unsur jiplakan atau plagiat pada naskah skripsi yang saya tulis, saya bersedia skripsi dan gelar akademik saya dibatalkan dan sanggup mempertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa ada pakasaan dari pihak manapun.

Jombang, 22 Juli 2025

Pembuat pernyataan,



SUPARTO

NIM. 212365201002

HALAMAN PERSEMBAHAN

- 1. Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang selalu memotivasi saya, cinta dan kebahagiaan mendampingi dalam langkah hidup;**
- 2. Teruntuk istriku ELOK SUROYAH dan Anak-Anakku AZKIYA NAFI' RUZIQO dan AHMAD KAMIL NAFI' ROZIQI yang mendo'akan dan selalu setia menemani kehidupan yang penuh berarti sampai sekarang ini;**
- 3. Untuk Abah ABDUL WAHAB yang menjadi suport system serta jadi cambuk buat saya;**
- 4. Keluarga Besar BAPAK SAMIRIN dan Keluarga Besar BANI SYA'RONI yang selalu memberikan dukungan ;**
- 5. Para dosen fakultas fisipol yang dengan penuh kesabaran memberikan dukungan untuk terus meningkatkan diri dalam pendidikan;**
- 6. Kawan-kawan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) dan BPBD Kabupaten Jombang yang selalu memberikan motivasi, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;**

Almamaterku Universitas Darul Ulum Jombang

HALAMAN MOTTO

Moto:

**DIDANAI OLEH KEIKHLASAN, DIPERJUANGKAN DENGAN
KESUNGGUHAN, DISELESAIKAN DENGAN RASA SYUKUR.**



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ Peran BPBD Terhadap Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang”. Dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan berbagai pihak, tidak akan mungkin penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, kepada:

1. Dr. H. Amir Maliki Abitolkha, M.Ag selaku Rektor Universitas Darul ‘Ulum Jombang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Drs. H Shobirin Noer, M.HI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul ‘Ulum Jombang yang memberikan bimbingan dan motivasi untuk kesempurnaan dan terselesaikannya skripsi ini
3. M. Nur Hidayat, S. Pd., M.Sosio selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul ‘Ulum Jombang.
4. Mukari, S. S., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul ‘Ulum Jombang
5. Farichatun Nisa', S. IAN., M.KP selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul ‘Ulum Jombang, sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi kepada kami semua untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr. H. Machwal Huda. M.Si dosen pembimbing pertama yang telah memberikan motivasi kepada kami semua untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Penguji Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul ‘Ulum Jombang
8. Seluruh Dosen Pengampu Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul ‘Ulum Jombang
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul ‘Ulum Jombang
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan hiburan, motivasi dalam kebosanan serta kejenuhan selama bimbingan skripsi.
11. Bapak/Ibu informan yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini yang bersedia menjadi subyek penelitian.
12. Segenap Keluarga dan pihak – pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan karya tulis ini. Selain itu, penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan tercapainya tujuan dari penulisan karya tulis ini.

Jombang 22 Juli 2025

Penulis

Peran BPBD Dalam Peningkatan Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan
Bencana Di Kabupaten Jombang

Suparto

NIM : 212365201002

Pembimbing 1 : Dr. H. Machwal Huda. M.Si

Pembimbing 2 : Farichatun Nisa', S. IAN., M.KP

Abstrak

Indonesia, Indonesia dikenal sebagai supermarket bencana, semua bencana kompleks ada di negeri ini secara letak geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar (Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia) dan merupakan bagian dari "Cincin Api Pasifik" (*Pacific Ring of Fire*). Pada tahun 2007 terbentuklah sebuah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana hal ini merupakan tonggak penting dalam upaya penanggulangan Bencana (UU no 24 2007) di Indonesia. UU ini hadir sebagai respons terhadap kerentanan geografis Indonesia terhadap berbagai jenis bencana baik alam, non-alam, dan sosial serta kebutuhan akan kerangka hukum yang komprehensif dan terpadu.

Kabupaten Jombang, dengan geografis dan demografinya, memiliki potensi risiko bencana yang tinggi, kesiapsiagaan masyarakat khususnya para relawan menjadi krusial, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak BPBD Kabupaten Jombang dan perwakilan relawan bencana, observasi partisipatif, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan BPBD Kabupaten Jombang memiliki peran penting dalam peningkatan kapasitas relawan melalui berbagai inisiatif, meliputi: penyelenggaraan pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara berkala, sosialisasi informasi terkini mengenai potensi bencana serta cara penanganannya dan pembentukan forum komunikasi antar relawan.

Kata kunci: Peran BPBD, Bencana, Kesadaran Bencana, Relawan.

The Role of BPBD in Increasing Disaster Awareness Among Disaster Volunteers in Jombang Regency

Suparto

NIM : 212365201002

Supervisor : Dr. H. Machwal Huda. M.Si

Co-supervisor : Farichatun Nisa', S. IAN., M.KP

Abstract

Indonesia is known as a disaster supermarket. All complex disasters occur in this country. Geographically, Indonesia lies at the confluence of three major tectonic plates (Eurasian, Pacific, and Indo-Australian), and is part of the "Pacific Ring of Fire." In 2007, the Disaster Management Law (Law No. 24 of 2007) was enacted, marking a significant milestone in disaster management efforts in Indonesia. This law was enacted in response to Indonesia's geographic vulnerability to various types of disasters, including natural, non-natural, and social, and the need for a comprehensive and integrated legal framework.

Jombang Regency, with its geographic and demographic characteristics, has a high potential for disaster risk. Community preparedness, particularly among volunteers, is crucial. This research used a descriptive qualitative approach, collecting data through in-depth interviews with the Jombang Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) and representatives of disaster volunteers, as well as participant observation and documentation. The research findings indicate that the Jombang Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) plays a crucial role in enhancing volunteer capacity through various initiatives, including: conducting regular disaster mitigation and preparedness training, disseminating up-to-date information on potential disasters and how to handle them, and establishing a communication forum for volunteers.

Keywords: Role of BPBD, Disaster, Disaster Awareness, Volunteers.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul " Peran BPBD Dalam Peningkatan Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang" ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Darul Ulum.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang di garis khatulistiwa, tak hanya kaya akan keindahan alam dan keragaman budaya, tetapi juga dikenal sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Pernyataan "Indonesia rawan bencana" bukanlah isapan jempol belaka, melainkan sebuah realitas geografis dan geologis yang menuntut kewaspadaan dan kesiapsiagaan berkelanjutan. Tak hanya itu, sebagai negara dengan iklim tropis dan curah hujan yang tinggi, Indonesia juga sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kombinasi antara faktor geologis dan hidrometeorologis inilah yang membuat daftar panjang potensi bencana alam di Indonesia.

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan semoga bermanfaat untuk seluruh relawan di kabupaten jombang serta untuk kemajuan BPBD Jombang dan pemerintah Kabupaten Jombang.

Jombang 22 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viiiError! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Definisi Konsep.....	11
2.2.1 Peran	11
2.2.2 Bencana.....	11
2.2.3 Kesadaran bencana	11
2.2.4 Relawan Bencana	12
2.3 Landasan Teori.....	14
2.3.1 Peran	14
2.3.2 Bencana.....	16
2.3.3 Relawan Bencana	18
2.4 Kerangka Konseptual	24

BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Desain Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Teknik Penentuan Informan.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	29
3.6 Teknik Analisa Data	30
 BAB IV GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN.....	 32
4.1 Kabupaten Jombang	32
4.1.1 Aspek Geografis dan Demografis	33
4.1.2 Aspek Topografi.....	35
4.1.3 Tanah	35
4.1.4 Aspek Geologi dan Hidrogeologi.....	35
4.1.5 Daerah Rawan Bencana	36
4.1.6 Kemiringan Lereng.....	38
4.1.7 Iklim dan Curah Hujan	39
4.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang ..	40
4.2.1 Profil BPBD Kabupaten Jombang.....	40
4.2.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Jombang	42
4.2.3 Kepegawaian BPBD Kabupaten Jombang	43
4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Jombang	43
4.2.5 Visi Misi BPBD Kabupaten Jombang.....	49
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 51
5.1 Peran BPBD Jombang Dalam Meningkatkan Kesadaran Bencana Di Kalangan Relawan Bencana	51
5.2 Bentuk Pelatihan Yang Diberikan BPBD Kepada Relawan.....	55

5.3 Bentuk Kerja Sama Antara BPBD Dengan Komunitas Relawan Atau Organisasi Masyarakat.....	57
5.3.1 Efektivitas Peran BPBD dalam meningkatkan kesadaran bencana di kalangan relawan.....	59
BAB VI PENUTUP	67
6.1 Kesimpulan	67
6.1.1 Peran.....	67
6.1.2 Tantangan.....	68
6.2 Saran	70
6.2.1 Bagi BPBD Jombang.....	70
6.2.2 Bagi Komunitas Relawan	70
6.2.3 Bagi Pemerintah Daerah	71
6.2.4 Bagi Masyarakat Umum.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Jumlah bencana di Indonesia tahun 2024	1
Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual.....	24
Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kabupaten Jombang dan Daerah Aliran Sungai (Sumber : BPBD Kabupaten Jombang).....	34
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Peraturan Daerah 2011)	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Jombang Sumber: BPBD Kab. Jombang	5
--	---



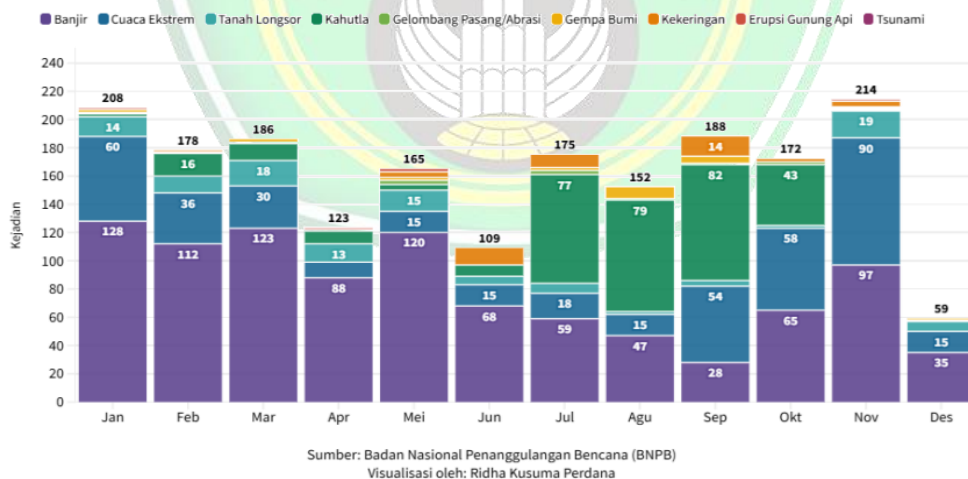
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia tercatat sebagai Negara yang rawan terjadinya bencana alam. Sepanjang abad 21, tercatat hingga 2018 Indonesia telah mengalami ± 1.999 kejadian bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan (Heryanto, 1999). Posisi geografis Indonesia berada di garis gunung berapi dan diapit oleh dua samudra besar (Wardhani, 20145). Selain itu, Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng utama dunia, menyebabkan rawan terhadap gempa bumi yang diikuti tsunami. Letak Indonesia di cincin api (*ring of fire*) menjadikan Indonesia negara yang kerap dilanda letusan gunung berapi (Tempo, 2018).

Berikut ini jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia :



Gambar 1.1 Jumlah bencana di Indonesia tahun 2024

Selama tahun 2024 terdapat 1.088 bencana banjir dan 135 bencana tanah longsor yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Korban meninggal dan hilang dalam bencana banjir bandang sebanyak 248 orang sedangkan bencana tanah longsor berjumlah 233 orang.

Data geografis tersebut menunjukkan kebenaran gempa dan tsunami Aceh 2004 silam menjadi bencana terbesar pertama di Indonesia dan Tsunami terbesar ketiga di dunia setelah Krakatau dan Jepang (Liliweri, 2020). Seperti halnya Indonesia, Jepang juga disokong oleh banyak lempengan bumi yang selalu aktif bergerak setiap tahunnya, sehingga rawan terjadinya bencana gempa dan tsunami.

Melihat fenomena ini, pemerintah memandang penting pengendalian bencana. Bencana alam memang tidak bisa dielakkan, namun pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana. Belajar dari bencana gempa dan tsunami Aceh 2004 yang menimbulkan ratusan korban jiwa, Indonesia mulai mempersiapkan penanggulangan bencana dengan lebih terencana.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia ialah membentuk lembaga pemerintah non-departemen, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mempunyai tugas membantu pemerintah Indonesia dalam penanggulangan bencana sesuai dengan amanat yang tercantum pada UU No. 24 Tahun 2007 (Pristianto, 2019). Selain itu juga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang melaksanakan tugas

penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB.

Undang-Undang RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat beberapa pasal terkait pentingnya informasi kebencanaan. Pasal 21 (c) menyebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. Pasal 26 ayat 1(c) disebutkan setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Pasal 27 (c) menyatakan setiap orang berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana¹.

Dari pasal di atas terlihat jelas bahwa informasi kebencanaan merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat. Kejelasan informasi akan menentukan cara individu bereaksi terhadap bencana. Penyampaian informasi termasuk proses mitigasi bencana yang bertujuan untuk menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkannya. Peran komunikasi risiko bencana yang merupakan bagian dari komunikasi lingkungan, menjadi hal mendasar dalam manajemen komunikasi bencana (Asteria, 2016).

Kabupaten Jombang adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan secara resmi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

¹

Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Secara geografis Jombang berada pada 112o 03'45'' – 112o 27'21'' Bujur Timur dan 07o 20'21'' – 07o 46'45'' Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.159,50 km², Kabupaten Jombang terdiri dari 21 Kecamatan, 306 Desa/Kelurahan dan 1.258 Dusun.

Pemandangan yang indah nan asri Kabupaten Jombang memiliki risiko akan kejadian bencana alam yang tinggi hampir semua desa di kabupaten Jombang memiliki tingkat kerawanan akan terjadinya bencana baik alam maupun non alam dan bahkan bencana sosial, sejarah kejadian bencana merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai contoh, Angin puting beliung di Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, pada 17 Januari 2024. Bencana ini terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang. Banjir yang melanda Desa Jombok, Kesamben, Jombang Banjir akibat meluapnya Avur watudakon merendam permukiman penduduk Dusun Beluk dan Kedondong di Desa Jombok. Tinggi banjir di Dusun Beluk mulai sebetis orang dewasa sampai 160 cm, sedangkan di Dusun Kedondong 20-70 cm. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan informasi kebencanaan di kalangan masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan bencana, pemerintah melalui BPBD dapat melakukan berbagai pendekatan, salah satunya pendekatan *hard power* yang merupakan upaya menghadapi bencana dengan pembangunan fisik seperti membangun sarana komunikasi (Rudianto, 2019). Adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi resiko bencana. Kecanggihan teknologi yang digunakan dan

ketersediaan dana yang memadai, tidak akan berarti bila komunikasi tidak berjalan baik (Asteria, 2016).

No	Jenis Bencana	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Banjir	51	25	45
2	Longsor/Gerakan tanah	19	4	57
3	Angin	76	33	0
4	Kekeringan	0	1	0

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Jombang Sumber: BPBD Kab. Jombang

Belajar dari peristiwa di atas, maka sudah seharusnya pemerintah bekerjasama dengan masyarakat mempersiapkan penanganan bencana sejak dini sebagai upaya menangani bencana dengan menekankan pada komunikasi bencana (*Disaster Communication*). Karena menurut Bakornas PB, paling tidak ada empat faktor utama bencana yang dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian besar, yaitu kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya (*hazards*), sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan sumberdaya alam (*vulnerability*), kurangnya informasi/peringatan dini (*early warning*) yang menyebabkan ketidaksiapan, dan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya (Prih Harjadi, dkk, 2017).

Pemerintah sebagai pengampu kebijakan penanggulangan bencana jelas tidak dapat bekerja sendiri tapi dapat melibatkan unsur mitigasi bencana yang potensial, yakni masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana adalah siklus alam yang harus terlibat dalam rangka

untuk mempercepat pemulihan dari bencana. Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat perlu proses pengembangan dan pengorganisasian manusia di semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga tercapai output baik dalam kuantitas dan kualitas dengan tujuan risiko bencana bagi masyarakat dapat diminimalisir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk relawan bencana, dalam menghadapi berbagai risiko bencana. Kabupaten Jombang merupakan daerah yang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Jombang memiliki tugas strategis dalam membina relawan bencana agar lebih siap dan tanggap dalam menghadapi situasi darurat. Peran BPBD Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan relawan bencana sangat krusial dalam upaya mitigasi bencana. Melalui edukasi, pelatihan, koordinasi, penyediaan sarana, dan evaluasi berkala, BPBD mampu membentuk relawan yang lebih siap dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Dengan sinergi yang baik antara BPBD dan relawan, upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang dapat berjalan lebih optimal demi keselamatan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas peneliti menganggap penting untuk mengadakan suatu penelitian dengan mengangkat judul “Peran BPBD Terhadap Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah **Bagaimana Peran BPBD Dalam Peningkatan Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang.?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran BPBD Dalam Peningkatan Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang

1.4 Manfaat Penelitian

1.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2.1 Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terutama Peran BPBD Terhadap Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai wilayah geografis yang rentan terhadap bencana alam, Indonesia secara rutin dihadapkan pada tantangan yang ditimbulkan oleh berbagai musibah, termasuk banjir. Dalam konteks ini, peran **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** menjadi krusial, tidak hanya dalam respons darurat, tetapi juga dalam upaya preventif, khususnya melalui **penumbuhan kesadaran masyarakat**.

Tabel perbandingan penelitian terdahulu dengan sekarang

Penelitian (Terdahulu)		Peneliti (sekarang)	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Guna Mencegah Banjir Di desa Hatapang Kabupaten Labuhan Batu Utara Hasibuan, Masriana (2021)	bagaimana BPBD Labuhan batu Utara melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Hatapang terkait risiko banjir dan langkah-langkah pencegahannya.	Suparto (2025)	Peran BPBD dalam peningkatan kesadaran bencana pada kalangan relawan bencana di kabupaten jombang.

Rifaldi (2023) Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menjalankan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Studi Kasus Bpbd Kabupaten Bantul)	BPBD lingkup sekolah berperan dalam mendidik anak agar memiliki sikap lebih siap menghadapi bencana, membantu memfasilitasi kebutuhan sekolah, dan mengenalkan pendidikan kebencanaan sejak dini.		Peran serta relawan di kabupaten jombang merupakan elemen penting dalam suatu penanggulangan bencana di kabupaten jombang.
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Teluk Air,	Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun adanya kesiapsiagaan dalam melakukan		peran strategis dalam meningkatkan kesadaran bencana di kalangan relawan melalui

Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Nazira Putri, Nurisa and Subiyakto, Rudi and Winarti, Novi (2023)	upaya penanggulangan bencana banjir dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karimun untuk mengatasi bencana banjir selain pihak dari pemerintahan Masyarakat setempat juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan bencana dalam hal ini bencana banjir.		pelatihan rutin, simulasi evakuasi, serta program pemberdayaan seperti <i>Desa Tangguh Bencana</i> dan <i>Sekolah Sungai</i> .
---	--	--	--

Persamaan mendasar yang ditemukan pada penelitian sebelumnya secara konsisten menyoroti peran sentral Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Meskipun fokus dan lokus penelitian mungkin berbeda,

terdapat benang merah persamaan yang mengindikasikan bahwa efektivitas BPBD sangat bergantung pada strategi komunikasi, edukasi, dan partisipasi aktif masyarakat, perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada obyek, hasil dan tahun penelitian.

2.2 Definisi Konsep

1. Peran

Dalam ilmu sosial, peran adalah aspek dinamis dari status (kedudukan).

Jika status adalah posisi seseorang dalam struktur sosial maka peran adalah semua hak, kewajiban, dan perilaku yang melekat pada status tersebut.

Dalam konteks umum secara mendasar, peran adalah seperangkat harapan, norma, perilaku, dan tanggung jawab yang dikaitkan oleh masyarakat pada individu yang menduduki suatu status atau posisi sosial.

2. Bencana

Menurut (UU no 24 2007) Tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.

3. Kesadaran bencana

Merujuk pada tingkat pemahaman, perhatian, dan kesiapan individu atau kelompok terhadap potensi ancaman bencana serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Kesadaran ini

mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghadapi, beradaptasi, dan memitigasi risiko bencana.

4. Relawan Bencana

Adalah individu atau kelompok yang secara sukarela membantu dalam penanganan bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi. Mereka biasanya terlibat dalam berbagai aktivitas seperti evakuasi, distribusi bantuan, pertolongan pertama, pemulihan pasca-bencana, hingga edukasi dan mitigasi risiko bencana (BNPB 2011).

5. TAGANA (Taruna Siaga Bencana)

ialah relawan yang bergerak di bidang shelter dan pengungsian yang dibentuk oleh KEMENSOS;

6. SEMAR (Semangat Masyarakat Relawan)

Relawan yang bergerak pada bidang komunikasi radio komunikasi dan SAR (*serch and rescue*);

7. RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia)

Sama halnya dengan Semar, rapi adalah relawan yang bergerak di bidang komunikasi bedanya adalah kalau rapi tidak bergerak di bidang SAR;

8. ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia)

Sama halnya dengan Semar dan rapi, orari juga bergerak di bidang komunikasi;

9. SENKOM (Sentra Komunikasi)

Sama dengan relawan diatas, senkom adalah relawan komunikasi yang dinaungi oleh sebuah lembaga keagamaan (LDII);

10. **BAGANA** (Banser Tanggap Bencana)

Lembaga relawan yang beranggotakan Banser aktif yang bergerak di bidang kebencanaan, memiliki keahlian Keposkoan dan SAR;

11. **LPBI-NU** (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama)

Adalah sebuah lembaga yang bergerak pada kebencanaan dan perubahan iklim dan di naungi oleh lembaga keagamaan Nahdlatul Ulama;

12. **GATANA** (Gambiran Tanggap Bencana)

Adalah Kumpulan relawan yang beranggotakan warga desa gambiran mojoagung yang bergerak dalam sosial Masyarakat, awal pembentukan Gatana berasal dari sebuah program Desa Tangguh Bencana;

13. **ILKJ** (Info Lantas Kriminal Jombang)

Relawan yang berawal dari komunitas media sosial yang beranggotakan masyarakat umum bergerak dalam bidang sosial dan bencana;

14. **ISJ** (Info Seputar Jombang)

Sama seperti ILKJ, ISJ merupakan relawan yang berawal dari komunitas media sosial yang beranggotakan masyarakat umum bergerak dalam bidang sosial dan bencana;

15. **FPRB** (Forum Pengurangan Risiko Bencana)

Ialah kumpulan dari semua elemen relawan yang dilebur jadi satu untuk penanggulangan bencana serta pencegahan dan mitigasi.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. (Sarwono, 2015)

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*) (Suhardono, 2020)

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran

merupakan tindakan atau perilaku dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dimana seseorang itu didalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan lembaga pemerintahan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan. (Thoha, 2017)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga

yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut

2.3.2 Bencana

Menurut (UU no 24 2007) Tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.

United Nations International Strategy For Disaster Reduction (UNISDR), mendefinisikan suatu keadaan dapat disebut bencana jika adanya peristiwa, terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba akan tetapi akan terjadi secara perlahan-lahan atau bertahap, menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan dan lain-lain dan berada di luar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya((UNISDR) n.d.).

Aspek mendasar dalam manajemen bencana meliputi kegiatan respon terhadap bencana, kesiapsiagaan menghadapi bencana dan minimalisasi (mitigasi) efek bencana yang ditimbulkan. Menurut PJ. Prihadi kegiatan penanganan bencana alam yang utama adalah peningkatan kesiapsiagaan

masyarakat dalam menghadapi bencana, yang mencakup (Eko Harry Susanto, 2017).

1. Meningkatkan pemahaman dalam penanganan bencana untuk aparat pemerintah daerah;
2. Pelatihan kepada masyarakat untuk tanggap bencana;
3. Paket Pendidikan masyarakat;
4. Pembuatan peta dan jalur evakuasi;
5. Pembuatan dan pemasangan signboard / rambu-rambu tsunami;
6. Simulasi berskala system peringatan dini dan evakuasi dari BMG ke pemerintah daerah (Pemda), pemda ke masyarakat, dan pemerintah melakukan evakuasi;
7. kampanye melalui media cetak dan elektronik;
8. Pelatihan untuk siswa sekolah.

Menurut undang-undang 14 tahun 2007 bencana dibagi ke dalam tiga katagori, yaitu bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial.

- Bencana Alam, yakni bencana yang disebabkan oleh perubahan kondisi alamiah alam semesta seperti angin badai, tanah longsor, gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, kekeringan dan kebakaran;
- Bencana Sosial, yakni bencana yang disebabkan oleh ulah manusia sebagai komponen sosial. Kerusuhan missal, teror bom, kelaparan, konflik sosial, politik dan ekonomi;

- Bencana Kompleks, yakni perpaduan bencana alam dan bencana sosial, seperti polusi lingkungan, epidemi penyakit (penyebaran wabah penyakit) dan kerusakan ekosistem;

2.3.3 Relawan Bencana

Adapun orang yang bisa menjadi relawan adalah semua orang yang secara ikhlas tanpa membedakan derajat, jenis kelamin dan status sosial bersedia mengabdikan dirinya tanpa mengharapkan pamrih (baik berupa imbalan maupun karir). Siapapun dapat menjadi relawan, selama memiliki semangat dan jiwa kerelawanan. Relawan tidak tergantung dari asal kelompok masyarakat maupun wilayah tertentu karena relawan tidak memperjuangkan kepentingan kelompok, agama, maupun wilayah tertentu.

Organisasi-organisasi yang berperan aktif Bersama BPBD Jombang terdiri :

1. **TAGANA** (Relawan Taruna Siaga Bencana);

TAGANA adalah singkatan dari **Taruna Siaga Bencana** Ini adalah organisasi relawan dari masyarakat yang dibekali ilmu dan pengetahuan yang dibentuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membantu penanggulangan bencana alam dan non-alam di seluruh Indonesia(Menteri Sosial Republik Indonesia 2012).

2. **SEMAR** (Semangat Masyarakat Relawan);

Semangat masyarakat Relawan adalah organisasi yang beranggotakan para relawan yang bertujuan untuk membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk

penanganan penanggulangan bencana alam, lingkungan hidup persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan dan hak asasi manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan para pendiri Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (semara n.d.).

3. RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia)

RAPI adalah organisasi sosial nirlaba yang beranggotakan pengguna perangkat radio komunikasi di Indonesia. Organisasi ini diakui dan disahkan oleh pemerintah sebagai wadah resmi bagi pemilik izin komunikasi radio antar penduduk;

4. ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia)

ORARI adalah organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio Indonesia yang bersifat mandiri, sosial, non-komersial dan non-politik. ORARI didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1968. Anggota ORARI sekitar 46.000 orang yang terhimpun di 32 ORARI Daerah (tingkat Provinsi) dan 382 ORARI Lokal (Tingkat Kabupaten/Kota). Peran Amatir Radio Indonesia sangat strategis dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, antara lain sebagai alat komunikasi para pejuang kemerdekaan dan menyiarkan Proklamasi ke seluruh dunia. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah No,21 tahun 1967 tentang Radio

Amatirisme di Indonesia yang menjadi dasar berdirinya Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari n.d.)

5. SENKOM (Sentra Komunikasi);

Pasca kerusuhan 1998 yang membuahkan keruntuhan keamanan sistem pemerintahan Republik Indonesia, terjadi berbagai perebutan pengaruh yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, sebagian pemuda cinta tanah air direkrut dalam program Pam Swakarsa menghadapi pemilu 1999 dan sidang istimewa. Setelah itu, Pam Swakarsa dilebur, yang memenuhi syarat direkrut jadi Satpol PP. Sementara yang sudah bekerja atau mandiri diantaranya tergabung dalam OKP seperti GM Trikora, KNPI, Forum Pemuda Peduli Ukhuwah (FPPU) dan sebagainya. Di tengah berbagai kekacauan dan pergulatan konflik di masyarakat bernuansa SARA, GM Trikora, KNPI dan sejumlah organisasi lainnya terlibat dalam upaya pencegahan hingga penanganan konflik. Hingga kemudian karena banyaknya para pemuda ini dilibatkan dalam pengamanan konflik sosial bernuansa SARA, dikajilah berbagai upaya pemberdayaan pemuda. Hal ini berjalan hingga 8 Januari tahun 2002 ketika disahkan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Saat itu Kepolisian melihat bahwa para pemuda ini sebagai potensi karena dengan kelompok yang cukup kuat namun malah membantu kamtibmas, bukannya menjadi preman seperti kebanyakan kelompok kepemudaan saat itu, Pada tanggal 10 November 2004 Mengadakan Pelatihan Kamtibmas dengan Polda Metro Jaya, dalam kesempatan tersebut para tokoh dan Ikatan Kader Pemuda Mitra Kamtibmas

mengusulkan Nama “Sentra Komunikasi” dan Kombes Pol. Susno Hadiwinoto selaku Karo Binmas Polda Metro Jaya melengkapi dengan nama SENKOM “ **Sentra Komunikasi Mitra Polri**”(senkom n.d.).

6. BAGANA (Banser Siaga Bencana);

GP Ansor ialah organisasi kepemudaan. Berdiri sejak 24 April 1934. Di hari lahirnya yang ke 30, Banser sebagai sayap organisasi pemuda Nahdlatul Ulama (NU) ini resmi ditetapkan. Kaderisasi berjalan masif setiap minggu, membuat kader inti GP Ansor ini semakin bertambah. Ketua Umum PP GP Ansor sekaligus Panglima Tertinggi Banser, H Yaqut Cholil Qoumas menyebut, peningkatan jumlah kader berkisar 2 juta, dari 5 juta kader menjadi 7 juta kader. Tantangan ke depan setelah tambah ialah tumbuh. Dari wawasan hingga kapasitas kader. GP Ansor sebagai intelektual muda NU tentu merancang masa depan, agar kesinambungan organisasi tidak seperti lembu menarik gerbong besar dan panjang. Agar kader semakin bisa mengurus organisasi, bukan diurus organisasi. Menghidupkan organisasi, bukan mencari hidup di organisasi. Kebijakan dilakukan ialah membentuk satuan-satuan khusus berdasarkan bakat minat kader. Satu dari beberapa satuan yang ada ialah Bagana, Banser Siaga Bencana. Satuan tersebut menurut Kasatkornas Banser Ir H Alfa Isnaeni terdiri dari kader Gerakan Pemuda Ansor dan Banser sebagai kader penggerak, pengemban dan pengaman program-program sosial kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor. Kader dimaksud adalah anggota Gerakan Pemuda Ansor yang memiliki kualifikasi: disiplin dan dedikasi yang tinggi, kepedulian dan

solidaritas kepada sesama dalam penanganan bencana, ketahanan fisik dan mental yang tangguh dan dapat mewujudkan kepedulian sosial bagi semua lapisan masyarakat, terhadap peristiwa bencana dan dampaknya serta mengutamakan pengurangan risiko bencana(nahdlatul ulama n.d.-a).

7. LPBI-NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama);

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) merupakan lembaga penanggulangan bencana yang sebelumnya adalah ad hoc penanggulangan bencana di bawah naungan Pengurus Besar NU (Community Based Disaster Risk Management Nahdlatul Ulama yang disingkat CBDRM NU). Lembaga yang disahkan pasca Mukhtar NU ke 32 di Makassar berdasarkan SK PBNU 12/A.11.04/6/2010 ini akan melaksanakan seminar dan rapat kerja (Raker) pada tanggal 30-31 Juli bertempat di Jakarta(nahdlatul ulama n.d.-b).

8. GATANA (Gambiran Tanggap Bencana);

Gatana atau gambiran tanggap bencana adalah relawan hasil dari program BPBD Jombang yang bekerja sama dengan sebuah lembaga asal Amerika yaitu USAID-APIK, dalam hal ini gatana terbentuk dari seluruh lapisan masyarakat pembentukan gatana sendiri bertujuan untuk penanganan bencana awal khususnya di desa gambiran dan sekitarnya.

9. ILKJ (Info Lantas Kriminal Jombang);

ILKJ adalah sebuah grup media sosial (*facebook*) warga jombang dan sekitarnya, kelompok ini awalnya mengabarkan lalu lintas di area jombang

dan sekitarnya, selain mengabarkan lalu lintas ILKJ juga aktif dalam hal penanganan bencana di Jombang.

10. ISJ (Info Seputar Jombang);

Sama halnya dengan ILKJ info seputar jombang (ISJ) juga grup media sosial *facebook* selain update berita seputar jombang ISJ juga aktif sebagai salah satu relawan yang membantu BPBD Jombang dalam penanganan bencana baik dari segi informasi, pelaporan ataupun penanganan.

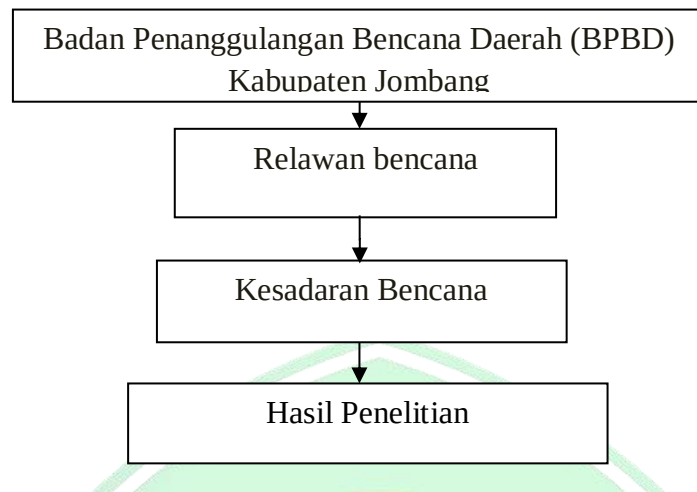
11. FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana)

FPRB adalah singkatan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana. FPRB menjadi organisasi non-formal yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. FPRB berperan penting dalam pengurangan risiko bencana, mulai dari perencanaan hingga penanggulangan. FPRB dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang (UU no 24 2007) tentang Penanggulangan Bencana dan (PP Nomor 21 2008).

Ini adalah wadah atau organisasi masyarakat yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya pengurangan risiko bencana di tingkat desa/kelurahan. FPRB berperan sebagai mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan organisasi lainnya dalam penanggulangan bencana.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Peran BPBD Terhadap Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. (Moleong, 2020)

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana Peran BPBD Terhadap Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi, tetapi dinamakan “*Social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono, (2022). Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut (Sugiyono 2019).

Jumlah informan ditetapkan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Snowball sampling adalah teknik penarikan sampel pada awalnya responden dipilih secara random dengan menggunakan metode *non-probabilitas* yang selanjutnya responden yang telah dipilih tersebut diminta untuk memberikan informasi mengenai responden-responen lainnya sehingga diperoleh tambahan responden Semakin lama kelompok responden tersebut semakin besar, ibarat bola salju yang jika menggelinding semakin lama semakin besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah data yang sedikit itu tersebut belum

mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Moleong, 2020) Informan dalam penelitian ini adalah pelaku yang terlibat dalam Peran BPBD Terhadap Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang yaitu: pegawai BPBD Kabupaten Jombang 2 orang dan 3 orang relawan.

1. Bagus Kurniawan, S.IP alamat JL. Jambu 03 RT/RW 01/05 Dusun Pekunden, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung;
2. Agus irmawan S.IP alamat JL Kedondong 13 RT/RW 04/06 Dusun Pekunden, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung;
3. Sakroni,(Relawan Bagana) Dsn. Mojosongo, RT/RW, 01/08, Ds. Balungbesuk, Kec. Diwek;
4. Wachyudi, ,(Relawan Orari) JL. Masjid no 42 Ds. Menganto, Kec. Mojowarno;
5. M. Rizky Effendi, S.T,(Relawan Semar) Dsn. Kebonsari, Ds. Karangwinongan, Kec. Mojoagung.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif memanfaatkan pengamatan, wawancara, dan penelaah dokumen untuk menelaah dan memahami situasi, sikap, dan pandangan baik individu ataupun kelompok (Moleong, 2020)

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan sebelum data yang lebih mendalam didapatkan. Dengan melakukan pengamatan diharapkan peneliti dapat melihat dan mengamati secara langsung pada keadaan yang

sebenarnya. Observasi dilakukan agar peneliti mendapatkan sendiri informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan melakukan pengamatan. (Moleong, 2020)

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2022). Metode wawancara diharapkan bisa mendapatkan data yang diinginkan dengan lebih mendalam sehingga akan dapat lebih mudah diambil kesimpulan dari data yang diperoleh. Lancarnya kegiatan wawancara tergantung pada kedua belah pihak sebagai pelaku wawancara dimana pewawancara yang memberikan sejumlah pertanyaan kepada informan dan kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Selain itu juga tergantung pada situasi dan kondisi saat wawancara dilakukan, baik tempat, kondisi pewawancara dan informan, waktu pelaksanaan wawancara, dan juga hubungan antara kedua belah pihak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendorong data yang sudah di peroleh dan mendukung teknik observasi dan wawancara yang sudah dilakukan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2022)

3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. (Sugiyono, 2022)

Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada, Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

- a. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.
- b. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara
- c. Triangulasi Waktu, Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses pemilahan data, pemilihan data, dan pengorganisasian data agar terstruktur secara sistematis dan menjadi suatu pola. Proses dalam analisis data antara lain: reduksi data, display data atau penyajian data, dan pengambilan kesimpulan..

a. Redukasi data

Data yang diperoleh dari lapangan sangatlah banyak, semakin lama peneliti berada di lapangan maka akan semakin banyak data yang didapat. Reduksi data akan memilah data yang didapatkan di lapangan sesuai dengan fokus penelitian sehingga peneliti akan lebih mudah menentukan data-data pokok dan mengambil kesimpulannya. Karena tujuan utama dari penelitian kualitatif sendiri adalah pada temuan. Kegiatan mereduksi data akan dipandu oleh tujuan penelitian yang akan dicapai. Diharapkan data yang telah direduksi oleh peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Proses ini akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian dilakukan.

b. Penyajian data

Penyajian data penelitian akan membuat data tersusun secara sistematis. Data yang diperoleh dengan banyak dalam penelitian tidak akan dapat dipaparkan secara keseluruhan. Dengan penyajian data, peneliti akan menganalisis mana data yang dapat menjelaskan atau menjawab masalah dalam penelitian. Penyajian data bisa dalam bentuk teks, bagan, jaringan, grafik ataupun matriks dengan menggabungkan informasi yang diperoleh secara padu agar dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dan memudahkan pengambilan kesimpulan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan data penelitian adalah berbentuk teks naratif

c. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan dapat menggambarkan sebuah objek yang diteliti dengan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian. Upaya penarikan kesimpulan terus-menerus dapat dilakukan peneliti saat berada di lapangan, saat melakukan penelitian hingga akhir proses penelitian. Penarikan kesimpulan yang bersifat sementara dapat diuji kembali dari data-data di lapangan dengan tujuan kebenaran ilmiah akan dapat diperoleh. Penarikan kesimpulan dapat berupa deskriptif sebagai laporan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sejak awal dan mendukung temuan dalam penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

4.1 Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang setelah memisahkan diri dari gabungannya dengan Kabupaten Mojokerto yang berada di bawah pemerintahan Bupati Raden Adipati Ario Kromodjojo, yang ditandai dengan tampilnya pejabat yang pertama mulai tahun 1910 sampai dengan tahun 1930 yaitu : Raden Adipati Ario Soerjoadiningrat. Menurut sejarah lama, konon dalam cerita rakyat mengatakan bahwa salah satu desa yaitu desa Tunggorono, merupakan gapura keraton Majapahit bagian Barat, sedang letak gapura sebelah selatan di desa Ngrimbi, dimana sampai sekarang masih berdiri candinya. Cerita rakyat ini dikuatkan dengan banyaknya nama-nama desa dengan awalan "Mojo" (Mojoagung, Mojotrisno, Mojolegi, Mojowangi, Mojowarno, Mojojejer, Mojodanu dan masih banyak lagi). Salah satu peninggalan sejarah di Kabupaten Jombang adalah Candi Ngrimbi, PulosariBareng. Bahkan di dalam lambang daerah Jombang sendiri dilukiskan sebuah gerbang, yang dimaksudkan sebagai gerbang Mojopahit dimana Jombang termasuk wewenangnya. Suatu catatan yang pernah diungkapkan dalam majalah Intisari bulan Mei 1975 halaman 72, dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Kromodjojo kepada residen Jombang tanggal 25 Januari 1898 tentang keadaan Trowulan (salah satu onderdistrict afdeeling Jombang) pada tahun 1880(Kab n.d.).

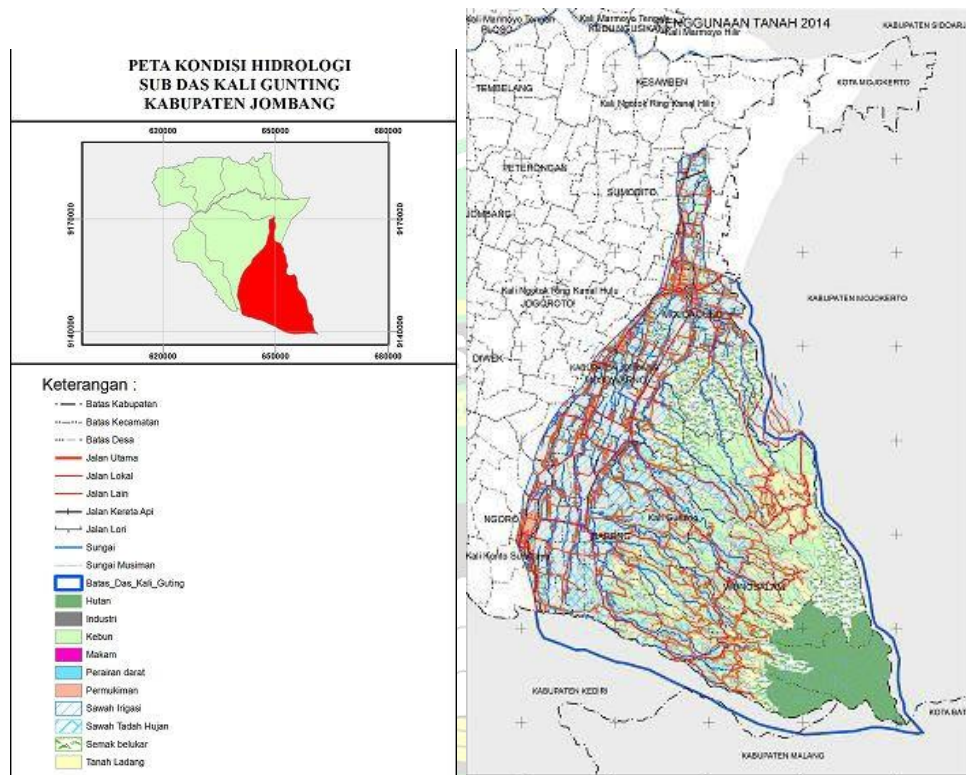
Kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya bukan dimulai sejak berdirinya (tersendiri) Kabupaten Jombang kira-kira 1910, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi onderdistrict afdeeling Jombang, walaupun saat itu masih terjalin menjadi satu Kabupaten dengan Mojokerto. Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistem pemerintahan Kabupaten Jombang telah dikelola dengan baik adalah saat itu telah ditempatkan seorang Asisten Resident dari Pemerintahan Belanda yang kemungkinan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang Lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Mojowarno sekitar tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung di Kota Jombang, juga tempat peribadatan Tridharma bagi pemeluk Agama Kong hu Chu di kecamatan Gudo sekitar tahun 1700. Konon disebutkan dalam cerita rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmu yang berkaitan dengan pembuatan Masjid Agung di Kota Jombang dan berbagai hal lain, semuanya merupakan petunjuk yang mendasari eksistensi awal-awal suatu tata pemerintahan di Kabupaten Jombang.

4.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

Kabupaten Jombang mempunyai letak yang sangat strategis. Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang sebagai daerah wisata dan kota pelajar serta kota industri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Jombang memiliki luas wilayah sebesar 115.950 Ha : 1.159,5 Km². Secara geografis(Badan Pusat Statistik n.d.).

Kabupaten Jombang terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa berada antara 112°03'45" sampai 112°27'21" Bujur Timur dan 07°20'37" sampai 07°46'45 Lintang Selatan.



Gambar 4 1 Peta Wilayah Kabupaten Jombang dan Daerah Aliran Sungai
(Sumber : BPBD Kabupaten Jombang)

Sementara secara demografis berdasarkan hasil jumlah penduduk Kabupaten Jombang sebesar 1.202.407 jiwa. Angka ini sudah melampaui hasil Sensus Penduduk 2010 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jombang sebagai Ibukota Kabupaten dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Wonosalam, Kabuh, Plandaan, Megaluh dan Ngusikan.

4.1.2 Aspek Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari dataran rendah, yakni 95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500 meter, sementara 50,76% memiliki ketinggian 500-700 meter, dan 0,6% memiliki ketinggian >700 meter yang berada di Kecamatan Wonosalam.

4.1.3 Tanah

Faktor penting yang sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah, diantaranya adalah aliran sungai yang cukup besar dan material hasil letusan gunung berapi. Dimungkinkan bahwa hasil letusan Gunung Kelud terbawa arus deras sungai Brantas, kali Konto dan sungai-sungai lainnya yang mengalir dari selatan/tenggara ke utara masuk melintasi wilayah Kabupaten Jombang, penggunaan tanah di Kabupaten Jombang didominasi oleh sawah yang mencapai 42,19 persen dari luas wilayah Kabupaten, kemudian permukiman/ perumahan 24,08 persen, hutan 19,46 persen, tegal 11,62 persen dan penggunaan lainnya 2,65 persen.

4.1.4 Aspek Geologi dan Hidrogeologi

Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologi, Kabupaten Jombang termasuk dalam wilayah Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto, yang merupakan bagian dari cekungan air bawah Brantas yang sebarannya berada di wilayah Sungai Brantas. Aliran air bawah tanah di wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi dua bagian, yaitu aliran air bawah tanah yang mengalir ke sungai Brantas dari arah barat-selatan (wilayah cekungan air bawah tanah Kediri– Nganjuk dan perbukitan vulkanik/Wonosalam), dan

aliran air bawah tanah yang mengalir ke sungai Brantas dari utara (wilayah perbukitan struktural/Kabuh).

4.1.5 Daerah Rawan Bencana

Kawasan – kawasan yang rawan bencana pada dasarnya memerlukan perhatian khusus dan antisipasi yang lebih. Kawasan rawan bencana alam merupakan suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam, terdiri dari bencana tanah longsor, banjir dan puting beliung. Sedangkan, kawasan bencana geologi berupa gempa tektonik.

Berikut beberapa wilayah di Kabupaten Jombang yang menjadi kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis bencana masing – masing:

1) Kawasan Rawan Bencana Geologi (Gempa Tektonik)

Berikut beberapa wilayah yang berpotensi timbul gempa tektonik di Kabupaten Jombang. Bahaya dari aspek geologi tanah di Kabupaten Jombang antara lain berada di wilayah :

- a. Kecamatan Plandaan;
- b. Kecamatan Kabuh;
- c. Kecamatan Ngusikan ;
- d. Sebagian Kecamatan Megaluh dan BandarKedungmulyo.

2) Kawasan Rawan Bencana Erosi dan Longsor

Erosi tanah dipengaruhi oleh faktor kemampuan tanah yang lain, terutama kemiringan tanah selain oleh curah hujan dan penutup tanah. Tanah tegalan mempunyai tingkat erosi yang lebih besar dari pada tanah sawah, oleh karena itu usahapertanian pada tanah tegalan yang berkelerengan

relatif tinggi perlu adanya tindakan pengawetan tanah, adapun Kecamatan yang rawan terkena longsor adalah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Ngusikan, dan Kecamatan Plandaan, Kudu, Kabuh.

Secara topografis, Kecamatan Wonosalam terletak pada posisi topografi paling tinggi (lereng tengah-atas), sementara itu Kecamatan Bareng, Mojoagung dan Mojowarno terletak pada lereng kaki Gunung Anjasmoro(Jombang n.d.).

3) Kawasan rawan Banjir

Banjir paling parah berpotensi terjadi di Kabupaten Jombang terdapat di wilayah Mojowarno karena limpahan dari Kali Putih, Wilayah Mojoagung dan Sumobito karena wilayah tersebut menjadi pertemuan tiga sungai, yaitu Kali Gunting, Catakanteng dan Kali Pancir. Wilayah Kecamatan Tembelang dan Kecamatan Kesamben akibat luapan Kali Ngotok Ring Kanal dan afvour Watudakon. Wilayah Kecamatan Plandaan akibat luapan Kali Beng, Wilayah Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Ploso akibat luapan Kali Marmoyo,serta Wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo akibat luapan Kali Konto.

Berikut wilayah yang secara historis merupakan wilayah banjir atau genangan yang ada di Kabupaten Jombang: Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Gudo,

Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Mojowarno, dan Kecamatan Diwek, Kecamatan Perak. Luas kawasan rawan banjir 1.585,72 Ha. Sungai – sungai yang menyebabkan banjir pada wilayah -wilayah tersebut diatas sebagian besar menjadi kewenangan pusat dan provinsi(Kusnuardi 2011).

4) Penyebaran Bahaya Angin Puting Beliung

Berikut wilayah yang secara historis merupakan wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting beliung yang ada di Kabupaten Jombang adalah :

a) Kecamatan Bandarkedungmulyo

Ds. Mojokambang, Dsn. Mojotengah, Kemendung, Krembung, Wonorejo)

b) Kecamatan Perak

Desa Plosogenuk (DsSukorejo), Ds Kalangsemanding dan Ds Glagahan

c) Kecamatan Ngoro

Ds. Genukwatu (Dsn. Genukwatu, Godong), Ds. Sugihwaras (Dsn. Cermenan), Ds. Gajah (Dsn. Gandan),Ds. Ngoro (Dsn. Pandean, Ngoro kidul), Ds. Kauman(Dsn. Kauman ,Dsn. Genggeng), Ds. Sugihwaras (Dsn. Cermenan), Ds. Gajah (Dsn. Gandan), Ds. Rejoagung (Dsn. Genggeng), Ds. Gabusbanaran, Ds. Sentul, Ds. Pesantren (pemerintah kabupaten jombang 2021).

4.1.6 Kemiringan Lereng

Kemiringan wilayah Kabupaten Jombang dapat dibedakan menjadi 4

(empat) kelompok, yaitu:

1. Kelerengan 0-2% meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang kecuali Kecamatan Wonosalam;
2. Kelerengan 2-5% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan;
3. Kelerengan 15%-40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan;
4. Kelerengan >40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan.(Adi et al. 2022)

4.1.7 Iklim dan Curah Hujan

Keadaan iklim pada suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor hujan. Wilayah Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh iklim tropis dengan angka curah hujan rata-rata berkisar 1.800 mm/tahun dan temperatur antara 20 °C – 32 °C. Seperti umumnya di daerah lain, Kabupaten Jombang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Maret, November dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus curah hujan relatif rendah (BPS Kabupaten Jombang 2022).

4.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang

4.2.1 Profil BPBD Kabupaten Jombang

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah terpadu, menyeluruh dan tangggap terhadap perubahan dengan tujuan untuk koordinasi antar pelaku, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan guna tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang(peraturan daerah 2011) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di

tingkat provinsi atau kabupaten/kota. BPBD dibentuk untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Adapun Tugas Utama Dari BPBD Adalah

1. Perencanaan dan Kebijakan

Menyusun dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, termasuk pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

2. Koordinasi

Mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana antara berbagai instansi terkait, termasuk satuan kerja perangkat daerah, lembaga vertikal, dan pihak lain yang terlibat.

3. Pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan terkoordinasi, termasuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

4. Peringatan Dini

Mengembangkan sistem peringatan dini dan layanan berbasis teknologi untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana.

5. Tanggap Darurat

Menangani situasi darurat bencana dengan mengerahkan sumber daya dan melakukan upaya penyelamatan, evakuasi, dan bantuan kepada korban.

6. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

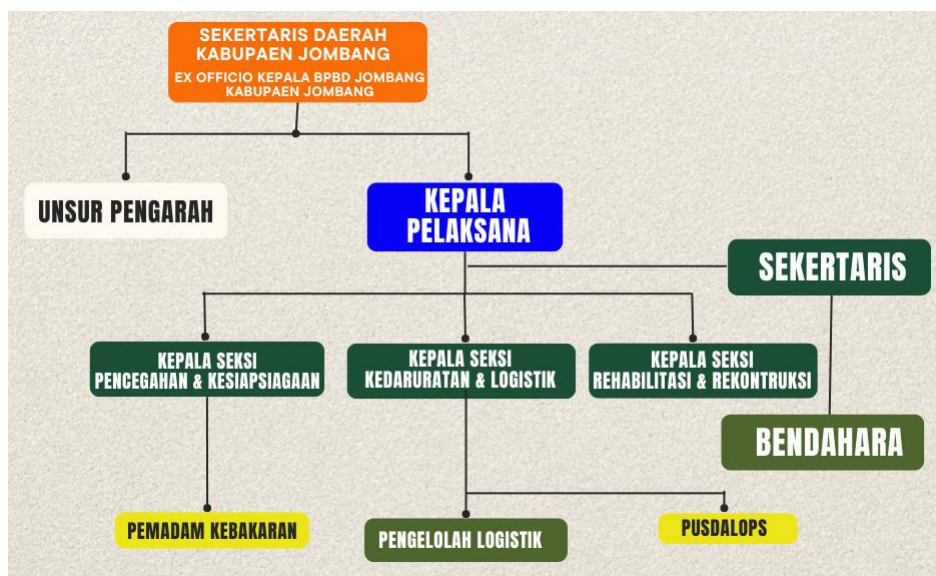
Memfasilitasi pemulihan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak bencana.

4.2.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Jombang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kepala Pelaksana BPBD;
- 2) Sekretaris;
- 3) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 4) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- 5) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 6) Kelompok Jabatan fungsional

Bagan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jombang (peraturan daerah 2011)

4.2.3 Kepegawaian BPBD Kabupaten Jombang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada awal tahun 2017 BPBD Kabupaten Jombang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 17 (Tujuh belas) orang ASN dan 4 (empat) orang PTT yang terdiri dari : 1 (satu) orang Kepala Ex Officio, 1 (satu) orang kepala Pelaksana, 1 (satu) orang sekretaris, 3 (Tiga) orang Kepala Seksi, dan 12 (Dua Belas) orang Staf. Latar Pendidikan S2 sebanyak 1 (satu) orang, Sarjana (S-1) sebanyak 8 (Delapan) orang dan SLTA 6 (enam) orang. Dan sesuai Peraturan Bupati Jombang Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Jombang dengan Klasifikasi B dan Kepala BPBD dijabat secara rangkap (Ex Officio) oleh Sekretaris Daerah.

4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Jombang

Pada Peraturan Bupati Jombang 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang memiliki tugas pokok membantu Bupati untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan, penanggulangan bencana, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi akibat bencana, dalam melaksanakan tugas pokok, BPBD memiliki fungsi untuk :

- 1) Penyusunan, perumusan rencana program dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;

- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Pelaksanaan urusan sekretariat.

Selanjutnya agar kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik, maka dirumuskan tugas pokok dan fungsi setiap seksi sebagai berikut:

- 1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD juga mempunyai fungsi antara lain :

- a) Menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang;
- b) Membuat perumusan kebijakan teknis penanganan bencana di Daerah;
- c) Melaksanakan pembinaan ketata usahaan;
- d) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan masing – masing;
- e) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil;
- f) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

- g) Pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
- h) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- i) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- j) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan serta tugastugas hubungan masyarakat dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang. Untuk melaksanakan Tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai Fungsi :

- a) Pengelolaan Urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta pengelolaan, perbaikan, perawatan sarana dan prasarana kantor;
- b) Pelaksanaan pengkoordinasian urusan kepegawaian dan upaya peningkatan kemampuan serta kesejahteraan pegawai;

- c) Pengelolaan Tata Usaha keuangan, anggaran, laporan pertanggungjawaban serta pembayaran gaji dan pembayaran lainnya;
- d) Pengkoordinasian penyusunan program dan akuntabilitas laporan;
- e) Pemeliharaan kebersihan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
- f) Pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas hubungan masyarakat;
- h) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Pelaksana BPBD dan semua karyawan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang;
- i) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kasi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;

- c) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- e) Pemantauan, Evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- f) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksimempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- d) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan kelompok fungsional mempunyai tugas dan fungsi melakukan sebagian tugas teknik unsur pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan yang berdasarkan beban kerja dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku(Jombang n.d.).

4.2.5 Visi Misi BPBD Kabupaten Jombang

1) Visi

Visi adalah penetapan sebuah misi adalah langkah awal untuk menentukan suatu instansi dalam mengatur dan menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal. Sesuai dengan usaha penanggulangan bencana BPBD

Kabupaten Jombang telah menetapkan sebuah visi yaitu **“Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana”**.

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang telah merumuskan misi yang harus dijalankan agar segala proses penanggulangan bencana dapat sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Maka, misi yang dirumuskan tersebut tetap mengacu pada

tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Jombang. Misi – misi tersebut di antaranya adalah:

- a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang handal;
- b) Melindungi masyarakat Kabupaten Jombang dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;
- c) Melindungi masyarakat Kabupaten Jombang pada saat tanggap darurat;
- d) Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi(portal resmi pemerintah kabupaten jombang 2021).



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Peran BPBD Jombang Dalam Meningkatkan Kesadaran Bencana Di Kalangan Relawan Bencana

Peran BPBD Jombang dalam meningkatkan kesadaran bencana di kalangan relawan bencana di Kabupaten Jombang, menurut pegawai BPBD Kabupaten Jombang, Bagus Kurniawan menjelaskan : “Peran kami cukup strategis. Kami rutin mengadakan pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi, serta koordinasi lintas sektor. Kami juga menggandeng komunitas relawan seperti BAGANA, SEMAR, ORARI, dan lainnya dalam kegiatan peningkatan kapasitas. Harapannya, mereka dapat menjadi perpanjangan tangan kami dalam edukasi masyarakat”

Agus Irmawan selaku pegawai BPBD menambahkan : “Kami punya program Sekolah Sungai dan Desa Tangguh Bencana yang melibatkan relawan sebagai fasilitator. Selain itu, dalam setiap simulasi penanggulangan bencana, relawan kami libatkan dari awal hingga proses evaluasi.”

Salah satu anggota BAGANA, sakroni menambahkan : “Kami merasa terbantu. BPBD Jombang sering melibatkan kami dalam pelatihan dasar kebencanaan dan manajemen posko. Selain itu, kami juga dilibatkan dalam simulasi di daerah rawan bencana.”

Beliau menambahkan : “Sangat berdampak. Kami jadi lebih siap, tahu prosedur yang benar, dan bisa menyampaikan informasi ke masyarakat dengan lebih tepat.”

Selain itu tanggapan dari salah satu anggota ORARI, Saudara Wahyudi menambahkan : “Kami biasanya dilibatkan dalam pelatihan komunikasi darurat. Dalam simulasi bencana, kami bertugas memastikan jalur komunikasi tetap berjalan saat sinyal konvensional terputus. BPBD juga memberikan pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kami saat tanggap darurat.”

“Kerja sama ini sangat membangun. Kami jadi tahu bagaimana mengomunikasikan informasi bencana secara cepat, akurat, dan terstruktur. Kesadaran kami sebagai relawan juga meningkat karena sering mendapat materi kebencanaan langsung dari BPBD”

Begitu pula keterangan salah satu anggota SEMAR, M. Rizky Efendi, juga mengatakan : “kami beberapa kali diundang dalam pelatihan penanggulangan bencana. BPBD juga memberi kami pemahaman tentang jenis-jenis bencana di Jombang dan bagaimana cara menghadapinya. Kami diajari bagaimana mengevakuasi warga dan memberikan pertolongan pertama.”

“Sekarang kami lebih paham risiko bencana, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti daerah aliran sungai. Kami juga bisa menyampaikan edukasi mitigasi bencana kepada warga sekitar.”

ASHARI sebagai salah satu relawan TAGANA sebagai mitra dalam penanggulangan bencana di kabupaten Jombang menuturkan bahwa BPBD selalu menggandeng kami dalam setiap kegiatan baik pelatihan ataupun edukasi kepada masyarakat, tentu hal ini sangat berdampak pada penanganan bencana pada skala kecil.

Adapun salah satu relawan RAPI (radio antar penduduk Indonesia) mas Bayan panggilan akrabnya mengatakan bahwasannya beberapa tahun ini BPBD aktif memberikan pelatihan dan simulasi kepada kami baik dari segi komunikasi ataupun kegawat darurat lainnya.

Pak Isnain sebagai ketua organisasi SENKOM mengatakan bahwa begitu banyak ilmu yang di dapat dari BPBD selama berkegiatan bersama ataupun sekedar ngopi bareng sambil sharing tentang ilmu kebencanaan, hal ini membuat anggota kami(senkom) memiliki kemampuan yang hampir merata satu sama lainnya dalam hal penanganan apabila terjadi bencana.

Sebagai salah satu lembaga yang membawa bendera organisasi kami LPBI-NU cukup mendapatkan ilmu untuk membuat anggota kami sadar akan kegawatdaruratan khususnya bencana, dalam hal ini kami berterima kasih kepada BPBD karena selalu melibatkan kami dalam setiap penanganan bencana dan pelatihan yang diadakan seperti yang dituturkan saudara Hasan sebagai salah satu pengurus LPBI-NU kabupaten Jombang.

Sebagai salah satu anggota GATANA mas Arif Priwo. W menuturkan bahwa pembentukan Gatana(Gambiran Tanggap Bencana) pertama kali diinisiasi oleh BPBD dalam hal ini perannya sangat sentral dalam pembentukan relawan di desa kami.

Eka Sapta ketua penggerak ILKJ (info lintas dan kriminal jombang) awal bertemu dengan BPBD ialah saat ada kejadian bencana banjir di wilayah kecamatan Kesamben, ia menuturkan pertama kali gabung masih bingung dengan tugas dan fungsi dari ILKJ akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian

dia diundang untuk mengikuti sebuah pelatihan penanganan bencana untuk komunitasnya dan sekarang saya dan anggota sudah tahu apa yang akan kami lakukan.

Wahyu Subianto menuturkan ISJ dalam 3 tahun terakhir selalu mendapat undangan dalam hal sosialisasi ataupun pelatihan dalam penanganan bencana hal ini membuat komunitas kami semakin aktif dalam penanganan bencana di kabupaten Jombang, hal ini cukup positif dalam perkembangan komunitas kami.

FPRB merupakan forum yang digunakan oleh masyarakat jombang untuk membahas isu kebencanaan yang ada di kabupaten Jombang, hal ini juga akan sangat berpengaruh dalam penanganan dari BPBD kepada masyarakat, kami cukup mendapatkan bekal ilmu yang cukup banyak mulai dari pelatihan sampai manajemen posko, hal ini disampaikan Lutfi salah satu anggota FPRB Jombang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan secara langsung BPBD Kabupaten Jombang memberikan pelatihan kebencanaan kepada relawan, seperti simulasi evakuasi, pertolongan pertama, dan manajemen posko. BPBD menginisiasi program seperti “Desa Tangguh Bencana” dan “Sekolah Sungai”, melibatkan relawan sebagai penggerak di masyarakat, BPBD secara aktif menggandeng berbagai organisasi relawan untuk terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

Relawan BAGANA: Menyatakan bahwa pelatihan dari BPBD meningkatkan kesiapan mereka dan memberi pemahaman praktis tentang

penanggulangan bencana. Relawan ORARI: Mendapat pelatihan komunikasi darurat dari BPBD yang sangat berguna dalam menjaga jalur informasi saat terjadi bencana. Relawan SEMAR: Mengapresiasi keterlibatan mereka dalam simulasi dan pelatihan, yang membuat mereka lebih memahami potensi dan penanganan bencana di wilayah masing-masing.

5.2 Bentuk Pelatihan Yang Diberikan BPBD Kepada Relawan

Bentuk pelatihan yang diberikan BPBD kepada para relawan bencana, seperti diungkapkan pegawai BPBD Kabupaten Jombang, Bagus Kurniawan menjelaskan :

“Kami memberikan pelatihan dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan dasar penanggulangan bencana, pelatihan penggunaan alat evakuasi, pelatihan pertolongan pertama pada korban bencana, serta pelatihan manajemen posko dan logistik. Kami juga sering mengadakan simulasi bencana bersama relawan untuk meningkatkan kesiapsiagaan mereka dalam situasi nyata.”

Agus Irmawan selaku pegawai BPBD menambahkan : “pelatihan dilakukan secara berkala setiap tahun, terutama menjelang musim penghujan atau ketika ada potensi bencana tinggi. Kami juga bekerja sama dengan TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya untuk pelatihan lintas sektor.”

Salah satu anggota BAGANA, sakroni menambahkan : “Kami pernah mengikuti pelatihan evakuasi korban banjir, pertolongan pertama, serta pelatihan penggunaan alat-alat penyelamatan seperti pelampung, tali, dan

perahu karet. Selain itu, ada juga pelatihan manajemen dapur umum untuk penanganan pengungsi..”

Beliau menambahkan : “Manfaatnya besar sekali. Kami jadi tahu prosedur yang benar, dan bisa bekerja lebih terkoordinasi saat terjadi bencana. Kami juga bisa mengedukasi warga agar lebih siap menghadapi bencana.”

Selain itu tanggapan dari salah satu anggota ORARI, Saudara Wahyudi menambahkan : “Kami lebih banyak mendapat pelatihan komunikasi darurat. Misalnya, bagaimana cara mengatur jaringan komunikasi saat listrik padam atau sinyal mati. BPBD juga melatih kami menggunakan peralatan radio yang disesuaikan dengan kondisi lapangan saat bencana”

“Komunikasi adalah hal yang sangat vital dalam situasi darurat. Pelatihan ini membuat kami lebih siap mendukung koordinasi antar tim relawan dan instansi.”

Begitu pula keterangan salah satu anggota SEMAR, M. Rizky Efendi, mengatakan : “Kami pernah ikut pelatihan penanganan bencana gempa dan banjir. Di sana kami diajari cara mengevakuasi korban, membuat jalur aman, serta bagaimana cara menangani situasi saat warga panik. Ada juga pelatihan mitigasi bencana berbasis komunitas.”

“Pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan teknis dan mental kami. Sekarang kami lebih tahu peran masing-masing saat ada bencana dan bisa bergerak lebih cepat dan efektif.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BPBD Jombang memiliki peran aktif dan komprehensif dalam memberikan pelatihan kepada

relawan bencana. Bentuk pelatihan yang diberikan mencakup aspek teknis, manajerial, hingga komunikasi darurat. Respon para relawan menunjukkan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan:

- a) Kesiapsiagaan dan keterampilan mereka;
- b) Koordinasi antarorganisasi saat bencana;
- c) Kemampuan mereka mengedukasi masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dari BPBD menjadi fondasi penting dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana.

5.3 Bentuk Kerja Sama Antara BPBD Dengan Komunitas Relawan Atau Organisasi Masyarakat

Bentuk kerja sama antara BPBD dengan komunitas relawan atau organisasi masyarakat selama ini terjalin dengan baik, hal ini sesuai dengan pernyataan pegawai BPBD Kabupaten Jombang, Bagus Kurniawan menjelaskan : “Tentu saja, kami menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas relawan seperti BAGANA, SEMAR, ORARI, RAPI, PMI, dan juga organisasi masyarakat seperti Karang Taruna serta kelompok tani. Bentuk kerja sama ini bersifat formal maupun informal, tergantung pada kegiatan”

Agus Irmawan selaku pegawai BPBD menambahkan : “Kerja sama ini meliputi pelatihan bersama, pelaksanaan simulasi bencana, penyebaran informasi peringatan dini, serta pembentukan dan pendampingan Desa Tangguh Bencana (Destana). Mereka juga kami libatkan dalam setiap respon bencana untuk membantu evakuasi, logistik, dan komunikasi.”

Salah satu anggota BAGANA, Sakroni menambahkan : “Ada. Kami sering dilibatkan dalam pelatihan bersama dan kegiatan tanggap darurat. Kalau ada bencana, biasanya kami langsung berkoordinasi dengan BPBD untuk membantu evakuasi warga dan distribusi bantuan. Kami juga dilibatkan dalam penyuluhan ke masyarakat..”

“selama ini komunikasi dengan BPBD cukup intens. Saat ada agenda pelatihan atau simulasi, kami selalu diundang.”.

Selain itu tanggapan dari salah satu anggota ORARI, Saudara Wahyudi menambahkan : “Ada kerja sama, terutama dalam hal komunikasi darurat. Kami menyediakan jaringan radio untuk mendukung komunikasi saat terjadi bencana. Kami juga dilibatkan dalam simulasi penanggulangan bencana dan pelatihan bersama BPBD.”

“Hubungan kami cukup baik. BPBD juga memberi kami akses untuk berkoordinasi langsung saat ada kondisi darurat, jadi komunikasi bisa cepat dan efisien..”

Begitu pula keterangan salah satu anggota SEMAR, M. Rizky Efendi, mengatakan : “Ada. Kami sering dilibatkan dalam patroli lapangan saat musim hujan, terutama di titik-titik rawan banjir atau longsor. Kami juga ikut dalam simulasi dan pelatihan relawan yang diadakan oleh BPBD”

“Kami jadi punya jalur koordinasi yang jelas. Ketika ada informasi potensi bencana, kami segera menyebarkannya ke warga dan membantu upaya mitigasi di lapangan.”

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BPBD Jombang menjalin kerja sama yang erat dan aktif dengan berbagai komunitas relawan serta organisasi masyarakat. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada tanggap darurat, tetapi juga mencakup aspek: Pencegahan (mitigasi), Kesiapsiagaan (pelatihan & simulasi), Respons cepat (evakuasi & distribusi logistik), dan Pemulihan pascabencana.

Relawan merasa dihargai dan dilibatkan secara langsung dalam berbagai kegiatan kebencanaan, sehingga hubungan kemitraan ini membentuk sistem penanggulangan bencana yang partisipatif dan kolaboratif di tingkat daerah.

5.3.1 Efektivitas Peran BPBD dalam meningkatkan kesadaran bencana di kalangan relawan

1) Efektifitas Peran Relawan

Peran BPBD menilai atau mengevaluasi efektivitas peran relawan setelah mereka mengikuti pelatihan atau pembinaan, seperti diungkapkan pegawai BPBD Kabupaten Jombang, Bagus Kurniawan menjelaskan :
“Penilaian kami dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, kami melihat keterlibatan relawan dalam simulasi dan kegiatan nyata, seperti saat terjadi bencana atau pelatihan lapangan. Dari situ bisa dilihat seberapa cepat dan tepat mereka merespons situasi. Kedua, kami melakukan evaluasi pascakegiatan melalui observasi, diskusi, dan laporan dari tim.”

Beliau menambahkan : “Kami lakukan secara berkala, terutama setelah kegiatan simulasi besar atau penanganan bencana. Evaluasi ini penting sebagai dasar perbaikan program pelatihan berikutnya.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa BPBD Jombang memiliki mekanisme evaluasi untuk menilai efektivitas peran relawan setelah pelatihan, dengan cara: Observasi langsung di lapangan saat simulasi atau penanganan bencana, Evaluasi pascakegiatan melalui forum diskusi, laporan kinerja, atau umpan balik dari relawan. Dan Monitoring keterlibatan relawan dalam berbagai kegiatan BPBD.

2) Tantangan terbesar yang dihadapi BPBD dalam meningkatkan kesadaran bencana di kalangan relawan

Berikut ini penjelasan pegawai BPBD Kabupaten Jombang, Bagus Kurniawan menjelaskan : “Salah satu tantangan terbesar adalah tingkat partisipasi relawan yang belum merata. Ada relawan yang sangat aktif, tapi ada juga yang hanya hadir saat kegiatan tertentu. Selain itu, keterbatasan waktu dan komitmen relawan, terutama yang bekerja atau masih kuliah, membuat mereka tidak bisa mengikuti seluruh pelatihan..”

Agus Irmawan selaku pegawai BPBD menambahkan : “beberapa relawan masih memiliki pemahaman yang kurang menyeluruh tentang manajemen bencana. Ada yang menganggap bencana hanya urusan evakuasi, padahal perlu ada kesadaran mitigasi sejak dini. Di sisi lain, kami juga menghadapi tantangan anggaran dan logistik untuk menjangkau seluruh komunitas relawan di daerah pelosok.”

“Kami terus melakukan pendekatan secara persuasif, memperkuat komunikasi lintas komunitas, serta menjalin kerja sama dengan instansi

lain dan lembaga pendidikan agar pelatihan bisa menjangkau lebih luas. Kami juga mulai memanfaatkan media digital untuk edukasi kebencanaan.

Dari hasil wawancara tersebut, berikut adalah penjelasan tentang tantangan terbesar BPBD dalam meningkatkan kesadaran bencana di kalangan relawan: 1) Tidak semua relawan aktif secara konsisten. Banyak yang hanya hadir saat ada bencana besar atau kegiatan besar, sehingga kesinambungan pembinaan menjadi sulit. 2) Sebagian besar relawan adalah pekerja atau pelajar, sehingga sulit untuk mengikuti pelatihan secara penuh dan 3) Beberapa relawan masih memandang peran mereka sebatas “membantu saat terjadi bencana,” tanpa pemahaman mendalam mengenai mitigasi dan edukasi masyarakat.

3) Harapan terhadap peran relawan dalam pengurangan risiko bencana di masa depan

Menurut pernyataan pegawai BPBD Kabupaten Jombang, Bagus Kurniawan menjelaskan : “Kami sangat berharap relawan tidak hanya aktif saat bencana terjadi, tetapi juga berperan aktif dalam tahap pra-bencana, terutama dalam hal edukasi dan mitigasi risiko di lingkungan masing-masing. Relawan bisa menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.”

“Mereka bisa menyosialisasikan jalur evakuasi, memberi penyuluhan ke masyarakat soal kesiapsiagaan, dan melibatkan warga dalam simulasi bencana. Kami berharap relawan juga membentuk jaringan kewaspadaan berbasis komunitas, misalnya sistem peringatan dini lokal.”

Langkah BPBD untuk mendukung harapan itu, dijelaskan Agus Irmawan selaku pegawai BPBD : “Kami akan terus melakukan pembinaan, pelatihan berkelanjutan, serta memperluas kemitraan dengan relawan lintas organisasi. Kami juga mendorong adanya kaderisasi relawan agar keberlangsungan peran mereka tetap terjaga”.

Berdasarkan hasil wawancara, berikut penjelasan tentang harapan BPBD terhadap peran relawan dalam pengurangan risiko bencana (PRB) di masa depan: melakukan perluasan peran relawan di tahap pra-bencana, Relawan Sebagai Agen Edukasi Masyarakat dan Pembangunan Sistem Kesiapsiagaan Berbasis Komunitas serta Kaderisasi dan Penguatan Kapasitas Relawan. Harapan BPBD adalah agar relawan menjadi garda terdepan dalam pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan, tidak hanya bersifat reaktif, tapi juga proaktif dan preventif. BPBD siap mendukung harapan ini melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan jejaring relawan.

4) Peran BPBD Jombang dalam memberikan pemahaman atau kesadaran tentang bencana kepada relawan

Menurut pernyataan relawan BAGANA, Saknori menjelaskan : “Menurut saya, BPBD Jombang sangat efektif. Kami sering dilibatkan dalam pelatihan rutin, simulasi bencana, dan pembinaan teknis. Mereka menjelaskan bukan hanya soal evakuasi, tapi juga tentang pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Jadi kami tidak hanya siap saat bencana, tapi juga bisa mengedukasi masyarakat sebelumnya.”

“Dulu kami hanya tahu cara membantu evakuasi. Sekarang kami paham bagaimana memetakan wilayah rawan, menyusun rencana evakuasi, dan memberikan edukasi ke warga tentang bahaya bencana.”

Relawan ORARI, Saudara Wahyudi menambahkan : “Sangat baik dan efektif. BPBD tidak hanya mengundang kami dalam pelatihan, tapi juga memberikan materi khusus tentang komunikasi darurat, prosedur koordinasi, dan peran ORARI saat sinyal konvensional tidak berfungsi. Ini sangat membantu kami dalam memahami peran kami secara menyeluruh” “kesadaran kami meningkat. Kami jadi lebih memahami pentingnya kesiapsiagaan sejak dini, dan peran komunikasi dalam keselamatan masyarakat saat bencana.”

Relawan SEMAR, M. Rizky Efendi, mengatakan : “BPBD sangat responsif dan pembinaannya tepat sasaran. Mereka memberikan pelatihan teknis, seperti simulasi penanganan banjir, gempa, dan longsor, serta pembinaan soal membangun kesadaran masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya bermanfaat untuk kami, tapi juga untuk lingkungan tempat kami bertugas”

Beliau juga merasa lebih siap setelah mengikuti pelatihan dari BPBD, berikut penuturannya : “Sangat siap. Bahkan kami sering jadi narasumber kecil di lingkungan kami, menyampaikan ulang materi dari BPBD. Itu karena pelatihan mereka mudah dipahami dan langsung bisa diterapkan.

Dari ketiga narasumber, jelas terlihat bahwa BPBD Jombang dianggap efektif oleh relawan dalam: 1) Memberikan edukasi dan

pembinaan secara rutin dan terstruktur, 2) Meningkatkan pemahaman teknis dan konseptual relawan tentang bencana, 3) Mendorong relawan menjadi agen edukasi di masyarakat, dan 4) Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepercayaan diri relawan dalam menghadapi bencana.

5) Tantangan sebagai relawan dalam berkolaborasi dengan BPBD

Menurut pernyataan relawan BAGANA, Saknori menjelaskan :
“Tantangan utamanya adalah soal komunikasi dan koordinasi di awal kegiatan. Kadang kami terlambat mendapat informasi pelatihan atau kegiatan, jadi tidak semua anggota bisa ikut. Selain itu, waktu pelatihan kadang berbenturan dengan jam kerja kami, karena sebagian besar relawan punya pekerjaan tetap.”

“Kadang soal peralatan dan logistik. Tidak semua lokasi bencana bisa langsung didukung dengan perlengkapan yang memadai, jadi kami sering harus improvisasi. Tapi secara umum kerja sama dengan BPBD sudah baik.”

Relawan ORARI, Saudara Wahyudi menambahkan : “Salah satu tantangan kami adalah penyesuaian sistem komunikasi. Kadang kami sudah menyiapkan perangkat dan frekuensi, tapi belum langsung sinkron dengan sistem BPBD, apalagi saat bencana besar yang padat koordinasi. Juga, kadang kurangnya pemahaman dari relawan lain tentang pentingnya komunikasi darurat, sehingga koordinasi awal kurang lancar.”

“Kami **terus** bangun komunikasi dua arah dengan BPBD dan mendorong adanya pelatihan bersama lintas organisasi. Harapannya supaya kami semua satu visi saat menghadapi kondisi darurat.”

Relawan SEMAR, M. Rizky Efendi, mengatakan : “Tantangannya lebih ke soal ketersediaan informasi dan transparansi agenda. Kadang kami tahu ada kegiatan dari informasi yang mendadak, jadi tidak semua anggota bisa bersiap. Selain itu, sebagai relawan kami juga butuh dukungan moral dan logistik yang merata, karena tidak semua kelompok relawan punya akses yang sama.”

“Tidak sampai mengganggu, tapi bisa mengurangi efektivitas. Kami tetap semangat karena tujuan kami sama: membantu masyarakat. Tapi kami berharap BPBD lebih terbuka dan rutin memberi informasi kegiatan jauh hari.”

Berdasarkan hasil wawancara, tantangan utama yang dirasakan relawan saat berkolaborasi dengan BPBD antara lain:

- a) Informasi kegiatan dari BPBD terkadang datang mendadak.
- b) Tidak semua relawan bisa mengikuti agenda karena keterbatasan waktu dan pekerjaan pribadi.
- c) Perbedaan sistem komunikasi teknis (terutama untuk ORARI) kadang menghambat sinkronisasi awal.
- d) Terbatasnya perlengkapan atau logistik di lapangan.
- e) Akses terhadap peralatan tidak merata di semua relawan.

- f) Kebutuhan improvisasi tinggi saat menghadapi medan sulit atau minim dukungan.
- g) Tidak semua relawan memahami peran dan protokol kebencanaan dengan sama rata.
- h) Kurangnya pelatihan lintas organisasi menyebabkan koordinasi awal belum maksimal.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memegang peran sentral dan krusial dalam meningkatkan kesadaran bencana pada relawan. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi, namun juga mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi untuk membentuk relawan yang tanggap, cakap, dan berdaya dalam menghadapi potensi bencana.

6.1.1 Peran

1. Penyelenggaraan Pelatihan dan Simulasi

BPBD secara rutin mengadakan berbagai pelatihan, mulai dari penanganan darurat, pertolongan pertama, evakuasi, hingga manajemen posko bencana. Pelatihan ini dilengkapi dengan simulasi lapangan yang realistis, memungkinkan relawan untuk mempraktikkan keterampilan yang telah dipelajari dalam skenario yang mendekati kondisi sebenarnya. Hal ini sangat krusial dalam membangun kapasitas dan kesiapan mental relawan;

2. Penyediaan Informasi dan Sumber Daya

BPBD menjadi sumber informasi utama mengenai potensi bencana di Jombang, termasuk peta risiko, jalur evakuasi, dan prosedur standar operasional (SOP) penanganan bencana. Mereka juga memastikan relawan memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan, seperti peralatan pelindung diri, logistik, dan jalur komunikasi yang efektif;

3. Koordinasi dan Integrasi Relawan

BPBD berperan penting dalam mengintegrasikan relawan ke dalam sistem penanggulangan bencana yang lebih luas. Ini termasuk pendaftaran dan pendataan relawan, pembentukan jejaring komunikasi, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas saat terjadi bencana. Koordinasi yang baik ini memastikan respon yang terpadu dan efisien;

4. Peningkatan Pengetahuan Bencana

Melalui program sosialisasi, lokakarya, dan distribusi materi edukasi, BPBD berupaya meningkatkan pemahaman relawan tentang berbagai jenis bencana, penyebabnya, dampaknya, serta cara mitigasi dan adaptasi. Pengetahuan ini esensial bagi relawan untuk tidak hanya bertindak saat bencana, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

6.1.2 Tantangan

1. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial, fasilitas, maupun sumber daya manusia. Pelatihan dan penyuluhan yang intensif memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, ketersediaan alat peraga, simulasi, dan lokasi pelatihan yang memadai juga seringkali menjadi kendala. BPBD Jombang mungkin perlu mencari skema pendanaan alternatif atau bermitra dengan organisasi lain untuk mengatasi hal ini.

2. Tingkat Pengetahuan dan Pengalaman Relawan

Relawan bencana datang dari berbagai latar belakang dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Menyelaraskan materi pelatihan agar sesuai untuk semua tingkatan menjadi tantangan tersendiri. Ada relawan yang sudah sangat berpengalaman, sementara yang lain mungkin baru pertama kali terlibat. BPBD perlu mengembangkan modul pelatihan yang berjenjang atau menyediakan materi adaptif untuk mengakomodasi perbedaan ini.

3. Jarak dan Waktu

Wilayah Jombang yang cukup luas dengan persebaran relawan yang beragam menjadi tantangan dalam hal jangkauan pelatihan. Tidak semua relawan dapat dengan mudah mengakses lokasi pelatihan yang terpusat. Selain itu, menjaga kontinuitas pelatihan agar kesadaran bencana tidak hanya menjadi peristiwa sesaat, melainkan terus diperbarui dan ditingkatkan secara berkala, juga merupakan hal yang sulit. BPBD bisa memanfaatkan teknologi (misalnya, pelatihan daring) atau mengadakan pelatihan di berbagai titik lokasi untuk mengatasi ini.

4. Partisipasi Aktif Relawan

Meskipun relawan memiliki semangat kemanusiaan, menjaga partisipasi aktif mereka dalam setiap program peningkatan kesadaran bencana memerlukan strategi khusus. Kesibukan pribadi, kejenuhan, atau kurangnya apresiasi dapat menurunkan semangat relawan. BPBD perlu merancang program yang menarik, interaktif, dan memberikan nilai tambah bagi relawan, seperti sertifikasi atau kesempatan berjejaring.

5. Koordinasi dan Sinergi Antar Pihak

Peningkatan kesadaran bencana tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD. Diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, seperti organisasi relawan, lembaga pendidikan, TNI/Polri, dan komunitas lokal. Tantangannya adalah menyatukan visi dan misi, serta memastikan setiap pihak menjalankan perannya secara efektif dan saling mendukung. BPBD perlu menjadi fasilitator utama dalam membangun jejaring kerja sama ini.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi BPBD Jombang

Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang telah dilakukan selama ini sudah efektif, namun perlu perbaikan dalam hal pemerataan informasi, logistik, dan penguatan kapasitas secara menyeluruh.

6.2.2 Bagi Komunitas Relawan

Relawan diharapkan tidak hanya menjadi pelaku lapangan saat bencana, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi masyarakat secara preventif. Penguatan kapasitas ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan berbasis komunitas.

6.2.3 Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu mendukung BPBD melalui kebijakan anggaran dan regulasi yang mendorong pembinaan relawan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

6.2.4 Bagi Masyarakat Umum

Kesadaran bahwa relawan adalah bagian penting dari sistem pengurangan risiko bencana harus diperkuat, sehingga masyarakat bisa lebih percaya dan bersinergi dengan relawan dalam situasi darurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Arum Faiza, Sabila J Firda, dkk. (2018). *Arus metamorfosa milenial*,. Kendal: Ernest.
- Asteria, D. (2016). Optimalisasi Komunikasi Bencana di Media Massa sebagai Pendukung Manajemen Bencana. (*ISKI: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*).
- Bencana, U. R. (n.d.). *UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Eko Harry Susanto, d. (2017). *Komunikasi bencana*, . Yogyakarta: Aspikom.
- Heryanto, M. (1999). *Bencana di Indonesia terjadi hingga September*. Jakarta: BNPB.
- Liliweri, A. (2020). *Strategi Komunikasi Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS.
- Moleong. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: : PT. Remaja Rosdakarya.
- Priambodo, S. A. (2019). *anduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prih Harjadi, dkk. (2017). *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. Jakarta: Bakornas PB.
- Pristianto, D. (2019). *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Jakarta: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Nasional_Penanggulangan_Bencana.
- Putra, Y. S. (2016). Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi. *Jurnal STIE AMA*.
- Rastati, R. (2018). Media Literasi Bagi Digital Natives: Perspektif Generasi Z di Jakarta. *Jurnal Teknologi Pendidikan*.
- Rudianto. (2019). Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Simbolika*.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Suhardono, E. (2020). *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tempo. (2018). *Tempo.co edisi Jumat 26 Oktober 2018*. Jakarta: <https://nasional.tempo.co>.
- Thoha, M. (2017). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- UU RI Nomor 24 Tahun 2007. (2007). *Penanggulangan Bencana*.
- Wardhani, A. C. (20145). *Urgensi Komunikasi Bencana Dalam Mempersiapkan Warga Di Daerah Rawan Bencana*. Lampung: Urgensi Komunikasi Bencana

- Dalam Mempersiapkan Warga Di Daerah.(UNISDR). n.d. "Strategy For Disaster Reduction."
- Adi, Asfirmanto W., Osmar Shalih, Fathia Z. Shabrina, Ahmad Rizqi, Anggara S. Putra, Rafa Karimah, Franta Eveline, Afif Alfian, Syauqi, Rizky Tri Septian, Yudhi Widiastomo, Yusuf Bagaskoro, Afifa Nomita Dewi, Irena Rahmawati, and Seniorwan. 2022. "Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021." *Pusat Data, Informasi Dan Komunikasi Kebencanaan BNPB* 16.
- Badan Pusat Statistik. n.d. "Jombang Dalam Angka 2019." 2019.
- BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2011. "Perka BNPB No 17 Tahun 2011." 66(July):37–39.
- BPS Kabupaten Jombang. 2022. "Kecamatan Sumobito Dalam Angka." 1–197.
- Jombang, BPBD. n.d. "Renstra BPBD Jombang."
- Kab, Jombang. n.d. "Sejarah Jombang."
- Kusnuardi. 2011. "Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Sub Daerah Aliran Sungai Gunting Kabupaten Jombang." 2:31–41.
- Menteri Sosial Republik Indonesia. 2012. "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Tagana." *Menteri Sosial Republik Indonesia* 2008:1–13.
- nahdlatul ulama. n.d.-a. "Lahirnya Bagana."
- nahdlatul ulama. n.d.-b. "LPBI-NU."
- Orari. n.d. "Orari."
- pemerintah kabupaten jombang. 2021. "Kajian Risiko Bencana Jombang."
- peraturan daerah. 2011. "PERDA_1_2011 Pembentukan BPBD Jombang.Pdf."
- portal resmi pemerintah kabupaten jombang. 2021. "Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023." *Jombangkab.Go.Id*. Retrieved (<https://jombangkab.go.id/berita/bupati-membuka-musrenbang-penyusunan-perubahan-rpjmd-kabupaten-jombang-tahun-2018-2023>).
- PP Nomor 21. 2008. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA." 49:69–73.
- semar. n.d. "Semar."
- senkom. n.d. "Sentra Komunikasi Mitra Polri."
- Sugiyono. 2019. "Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah." *Manajemen* 13–20.
- UU no 24. 2007. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana." *BPK RI* 21(5–6):1–49.
- (UNISDR). n.d. "Strategy For Disaster Reduction."

- Adi, Asfirmanto W., Osmar Shalih, Fathia Z. Shabrina, Ahmad Rizqi, Anggara S. Putra, Rafa Karimah, Franta Eveline, Afif Alfian, Syauqi, Rizky Tri Septian, Yudhi Widiastomo, Yusuf Bagaskoro, Afifa Nomita Dewi, Irena Rahmawati, and Seniorwan. 2022. "Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021." *Pusat Data, Informasi Dan Komunikasi Kebencanaan BNPB* 16.
- Badan Pusat Statistik. n.d. "Jombang Dalam Angka 2019." 2019.
- BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2011. "Perka BNPB No 17 Tahun 2011." 66(July):37–39.
- BPS Kabupaten Jombang. 2022. "Kecamatan Sumobito Dalam Angka." 1–197.
- Jombang, BPBD. n.d. "Renstra BPBD Jombang."
- Kab, Jombang. n.d. "Sejarah Jombang."
- Kusnuardi. 2011. "Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Sub Daerah Aliran Sungai Gunting Kabupaten Jombang." 2:31–41.
- Menteri Sosial Republik Indonesia. 2012. "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Tagana." *Menteri Sosial Republik Indonesia* 2008:1–13.
- nahdlatul ulama. n.d.-a. "Lahirnya Bagana."
- nahdlatul ulama. n.d.-b. "LPBI-NU."
- Orari. n.d. "Orari."
- pemerintah kabupaten jombang. 2021. "Kajian Risiko Bencana Jombang."
- peraturan daerah. 2011. "PERDA 1 2011 Pembentukan BPBD Jombang.Pdf."
- portal resmi pemerintah kabupaten jombang. 2021. "Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023." *Jombangkab.Go.Id.* Retrieved (<https://jombangkab.go.id/berita/bupati-membuka-musrenbang-penyusunan-perubahan-rpjmd-kabupaten-jombang-tahun-2018-2023>).
- PP Nomor 21. 2008. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA." 49:69–73.
- semar. n.d. "Semar."
- senkom. n.d. "Sentra Komunikasi Mitra Polri."
- Sugiyono. 2019. "Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah." *Manajemen* 13–20.
- UU no 24. 2007. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana." *BPK RI* 21(5–6):1–49.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS DARUL 'ULUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan : Gus Dur No. 29 A - Jombang 61413

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Suparto
2. Nomor Induk Mahasiswa : 212365201002
3. Jurusan / Program Studi : FISIPOL / Ilmu Pemerintahan
4. Judul Skripsi : Peran BPBD dalam Peningkatan Kesadaran Bencana pada kalangan Relawan Bencana di Kabupaten Jombang
5. Tanggal Pengajuan Skripsi : 28 Juli 2025
6. Pembimbing Utama : Dr. H. Machwidi Huda, M.Si
7. Pembimbing Pendamping : Faridatul Huda, S.IAN., M.KP
8. Konsultasi : Bimbingan Skripsi

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tandatangan	
			Mahasiswa	Dosen
1	2/6/25	Konsultasi judul dan Latar Belakang	[Signature]	Farid
2	13/6/25	Rumusan Masalah dan Tujuan	[Signature]	Farid
3	20/6/25	Tinjauan pustaka dan Kerangka Teori	[Signature]	Farid
4	30/6/25	Metode penelitian dan Teknik pengumpulan data	[Signature]	Farid
5	14/7/25	Hasil dan Pembahasan Sementara	[Signature]	Farid
6	21/7/25	Pembahasan final dan Kesimpulan	[Signature]	Farid
7	28/7/25	Revisi Akhir dan Persiapan Ujian	[Signature]	Farid

Catatan :

1. Berita Acara Bimbingan Skripsi ini dibawa Ketika konsultasi dengan Pembimbing.
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi ini wajib dilampirkan pada berkas skripsi.

Dosen Pembimbing,

Farid



Jombang, 28/7/2025
Drs. H. Shobirin Noer, M.HI.
 NPP. 900 201 020



UNIVERSITAS DARUL 'ULUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Gus Dur No.29 A Jombang 61453

Nomor : 104/L/Fisipol-Undar/V/2025
Lampiran : -
Perihal : **PERMOHONAN IJIN RISET / PENELITIAN**

Kepada : Yang terhormat
Kepala BPBD
Kab. Jombang
Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka bersama ini kami mohon diberikan ijin untuk melakukan penelitian/riset bagi mahasiswa di bawah ini :

N a m a : Suparto
Tempat/Tgl.Lahir : Jombang, 10 Juni 1986
N I M : 212365201002
JUR/ PRODI : Ilmu Pemerintahan
Alamat lengkap : Dsn. Cangak Ds. Sumberongko Kec. Ngusikan Kab. Jombang
Judul Skripsi : Peran BPBD Dalam Peningkatan Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang
Waktu : 01 Juni 2025 s/d 31 Juli 2025

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jombang, 24 Mei 2025

Dekan



Drs. H. Shobirin Noer, M.HI.

NPP: 900 201 020



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 141 Jombang 61411,
Telepon (0321) 868322, Faksimile -,
Laman bpbd.jombangkab.go.id, Pos-el bpbd@jombangkab.go.id

Jombang, 3 Juni 2025

Nomor : 400.14.5.4/547/415.46/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Ijin Penelitian

Yth.:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Darul 'Ulum
di
Jombang

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 104/L/Fisipol-Undar/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, Perihal: Permohonan Ijin Riset/Penelitian untuk mahasiswa:

Nama : **SUPARTO**
NIM : 212365201002
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat melakukan penelitian di BPBD Kabupaten Jombang sebagaimana proposal yang telah dilampirkan sepanjang waktu yang diperlukan dan dapat memanfaatkan data yang tersedia di BPBD Kabupaten Jombang untuk kepentingan penelitian.

Selanjutnya agar mahasiswa yang bersangkutan agar melanjutkan pengurusan ijin selanjutnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang untuk melengkapi perijinan penelitian yang akan dilaksanakan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ditandatangani secara elektronik



WIKU BIRAWA FILIPE DIAS QUINTAS,
S.STP., M.Si
NIP 197801071998031005

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMPSTP Kabupaten Jombang;
2. Sdr. **SUPARTO**.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmtsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmtsp@jombangkab.go.id

S U R A T I Z I N

Nomor : 200.1/126/415.35/2025

TENTANG

IZIN PENELITIAN

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Dekan FISIP Universitas Darul 'Ulum Jombang tertanggal 24 Mei 2025 nomor : 104/L/Fisipol-Undar/V/2025 perihal Permohonan Ijin Riset/Penelitian;
- d. Surat Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jombang tertanggal 11 Juni 2025 nomor : 200.1/366/415.45/2025 perihal Surat Rekomendasi.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Suparto
NIM : 212365201002
Instansi / Lembaga : Universitas Darul 'Ulum Jombang
Fakultas/Jurusan/Prodi : FISIPOL / Ilmu Pemerintahan
Kegiatan : Penelitian
Waktu Pelaksanaan : 01 Juni 2025 s.d 31 Juli 2025
Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Jombang
Judul Penelitian : Peran BPBD Dalam Peningkatan Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang
Jumlah Peserta : *terlampir*

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Membawa manfaat bagi semua pihak;
- Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait;
- Mentaati tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Tidak melakukan kegiatan diluar kegiatan Penelitian yang dimaksud;
- Menciptakan suasana yang kondusif di tempat kegiatan Penelitian yang dimaksud;
- Tidak melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat;
- Bertanggung jawab atas semua permasalahan yang terjadi akibat kegiatan Penelitian yang dimaksud.
- Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Jombang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 12-06-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si

NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN : SURAT IZIN
NOMOR : 200.1/126/415.35/2025
TENTANG : IZIN PENELITIAN

PESERTA :

No	NAMA PESERTA / NIM
1.	Suparto / 212365201002;
2.	-.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 12-06-2025
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)







